



PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Syahrina Zahara Lubis
Universitas Negeri Medan

Khairunnisa Harahap
Universitas Negeri Medan

Tapi Rumondang Sari Siregar
Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: syahrinazahara190@gmail.com

Abstract This study aims to analyze the effect of Government Accounting Standards (SAP) implementation on the quality of local government financial statements and to examine the role of the Regional Government Information System (SIPD) as a moderating variable. This study employs a quantitative approach using purposive sampling, resulting in 31 respondents from Regional Apparatus Organizations (OPD) within the Medan City Government. The data used are primary data collected through questionnaires. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling based on Partial Least Square (SEM-PLS) with the assistance of SmartPLS software. The results indicate that the implementation of SAP has a positive and significant effect on the quality of local government financial statements. However, SIPD is not able to moderate the relationship between SAP implementation and the quality of financial statements. This study strengthens institutional theory by highlighting the role of regulatory and normative pressures in improving the quality of public sector financial reporting through the implementation of accounting standards. The findings provide implications for local governments to enhance the consistency of SAP implementation and to optimize the use of SIPD through improving human resource competencies and information technology support. This study is limited by a relatively small sample size and a research scope confined to a single region, thus limiting the generalizability of the findings.

Keywords: Government Accounting Standards, Regional Government Information System, Financial Statement Quality, SAP, SIPD.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai faktor moderasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian kuantitatif ini mengumpulkan 31 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yang dibantu oleh SmartPLS, digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi SIPD tidak dapat mengontrol hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan. Studi ini meningkatkan penelitian teori institusional, terutama tentang bagaimana tekanan regulasi dan normatif membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menerapkan standar akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAP dan mengoptimalkan SIPD melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang relatif kecil serta ruang lingkup yang hanya mencakup OPD di satu daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, SAP, SIPD.

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan otonomi fiskal, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah menjadi masalah penting. Di Indonesia, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik semakin meningkat. Akibatnya, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien serta menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan dapat dipercaya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan sistem seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah sekarang memiliki banyak wewenang untuk mengelola keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berkat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, kewenangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan, seperti kesalahan klasifikasi anggaran, pengelolaan aset yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang baik harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Salah satu cara untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam konteks Pemerintah Kota Medan, permasalahan kualitas laporan keuangan tercermin dari diperolehnya opini WDP pada beberapa periode sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh ketidaktepatan klasifikasi anggaran dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi, khususnya melalui penguatan penerapan SAP dan dukungan sistem informasi yang memadai.

Diharapkan bahwa penggunaan teknologi informasi melalui SIPD akan membuat pengelolaan keuangan daerah lebih komprehensif, jelas, dan akuntabel. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa sistem informasi berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan SIPD sebagai variabel independen,

tetapi masih ada sedikit penelitian yang menempatkan SIPD sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta peran SIPD sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini

Teori Institusional

Teori institusional menjelaskan bahwa perilaku dan keputusan organisasi dipengaruhi oleh lingkungan institusional yang mencakup aturan formal, norma, nilai, serta ekspektasi sosial yang berkembang. Dalam perspektif ini, organisasi tidak hanya bertindak berdasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi, tetapi juga berupaya menyesuaikan diri terhadap tekanan lingkungan agar memperoleh legitimasi dan penerimaan publik (Pinto, 2017). Dengan demikian, praktik dan kebijakan organisasi merupakan hasil dari proses sosial yang terbentuk melalui tekanan eksternal yang bersifat regulatif dan normatif.

Teori ini juga menjelaskan bagaimana organisasi merespons perubahan lingkungan, khususnya dalam menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks sektor publik, praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang berkembang seiring meningkatnya tuntutan masyarakat dan regulator terhadap tata kelola yang lebih baik. Menurut DiMaggio & Powell (2016), organisasi cenderung mengalami keseragaman melalui proses *institutional isomorphism* yang terdiri dari *coercive*, *normative*, dan *mimetic*. *Coercive isomorphism* muncul akibat tekanan regulasi, *normative* berasal dari standar profesional, sedangkan *mimetic* terjadi ketika organisasi meniru praktik yang dianggap berhasil.

Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan SAP dan penerapan SIPD merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan regulatif dari pemerintah pusat serta tuntutan profesionalisme. Penerapan kedua instrumen tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga sebagai upaya memperoleh legitimasi dan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, efektivitas implementasi SAP dan SIPD masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman pengguna, serta dukungan infrastruktur teknologi. Maka dari itu, teori institusional menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis bagaimana penerapan SAP memengaruhi kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah serta peran SIPD dalam memperkuat hubungan tersebut melalui mekanisme legitimasi dan isomorfisme institusional.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu bukti kualitas ini. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Namun, laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan. Menurut Jati (2019), menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena mampu menampilkan kondisi keuangan secara lebih menyeluruh. Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui integrasi data, percepatan pelaporan, serta pengurangan kesalahan pencatatan (Ayem & Amahala, 2023). Dengan demikian, dukungan standar akuntansi dan sistem informasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang harus digunakan oleh semua lembaga pemerintah. SAP tidak hanya mengatur prosedur pencatatan, tetapi juga mencakup prinsip akuntansi yang membantu menghasilkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. (Aditya *et al.*, 2024). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP merupakan kerangka konseptual dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah serta menjadi pedoman bagi penyusun laporan, auditor, dan pengguna laporan keuangan.

Seiring perkembangannya, penerapan SAP di Indonesia mengalami perubahan dari sistem cash toward accrual menuju basis akrual penuh sejak tahun 2015. Penerapan basis akrual ini memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih komprehensif, karena tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran, tetapi juga mencerminkan posisi keuangan dan kinerja operasional pemerintah secara menyeluruh (Sekarsih *et al.*, 2024).

Hal ini ditandai dengan bertambahnya komponen laporan keuangan, seperti Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Anggaran Lebih/Kurang. Secara empiris, penerapan SAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian, seperti Herzeqovina & Erlina (2019) menunjukkan bahwa penerapan SAP meningkatkan kualitas LKPD, tetapi penelitian lain menunjukkan hal yang berbeda.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SAP masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kompetensi sumber daya manusia dan dukungan sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengelola data dan informasi pembangunan dan keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi.

Secara fungsional, SIPD berperan dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pengolahan data menjadi informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Diharapkan bahwa pengoptimalan pemanfaatan data dan informasi ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan (Mustaqmah & Putri, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Alfani & Nasution (2022) menemukan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas informasi dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan, meskipun masih terdapat kendala dalam proses penyesuaian sistem.

Namun, penelitian tentang dampak SIPD terhadap kualitas laporan keuangan masih menunjukkan perbedaan. Yamin *et al.*, (2025) menemukan bahwa meskipun penerapan SAP dan lingkungan pengendalian memengaruhi kualitas laporan keuangan, penerapan SIPD tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD, oleh karena itu, dalam penelitian ini, SIPD diposisikan sebagai variabel moderasi

yang dapat memperkuat hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis ini didasarkan pada hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sebagai tambahan, hipotesis penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman utama untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP bertujuan untuk membuat informasi keuangan pemerintah menjadi transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis berikut dibuat:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Memoderasi Hubungan antara Penerapan SAP dan Kualitas LKPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah hadir sebagai sistem terintegrasi yang mendukung seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. SIPD ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui integrasi sistem, SIPD memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa semua pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan mengurangi kesalahan pencatatan.

Dengan adanya SIPD, penerapan SAP dapat berjalan lebih optimal karena sistem ini membantu proses otomatisasi dan standarisasi pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Ayem & Amahala (2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan

dengan meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaporan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memoderasi hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Hubungan sebab-akibat antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai variabel moderasi dipelajari dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran empiris tentang pengaruh antar variabel dengan menggunakan pengujian statistic (Sugiyono, 2023).

Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh OPD di Pemerintah Kota Medan, kecuali kecamatan. Pengecualian kecamatan didasarkan pada fakta bahwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, unit tersebut tidak memiliki keterlibatan yang signifikan dalam proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan jika dibandingkan dengan OPD lainnya.

Sampling dilakukan dengan metode purposive. Sampel terdiri dari 31 OPD, termasuk dinas, badan, inspektorat, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan rumah sakit umum daerah. OPD tersebut memiliki otoritas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta menerapkan SAP dan SIPD. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah OPD, responden yang dipilih adalah Kepala Subbagian Keuangan, juga dikenal sebagai Kasubbag Keuangan, pada masing-masing OPD karena dianggap memiliki pemahaman yang kuat dan keterlibatan langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, total responden penelitian adalah 31 orang.

Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden digunakan dalam penelitian ini. Untuk menjamin kejelasan konsep dan kemudahan pengujian, variabel-variabel yang diteliti dioperasionalkan ke dalam indikator yang dapat diukur secara empiris. Variabel independen yang diteliti adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD), dan variabel moderasi adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Dewi *et al*, 2023).

Metode analisis data Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Analisis dilakukan dalam dua tahap yaitu, evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menguji validitas dan reliabilitas struktur, dan evaluasi model struktural (inner model) untuk menguji hubungan antar variabel dan menguji hipotesis.

Tiga konstruk variabel utama dioperasionalkan dalam penelitian ini dan masing - masing variabel menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur. Faktor bebas untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X) dihitung dengan menggunakan metrik yang mengukur konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman adalah beberapa ciri kualitatif laporan keuangan yang digunakan untuk mengoperasionalkan variabel dependen, yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y). Untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan

Variabel moderasi berupa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Z) diukur melalui indikator tingkat pemanfaatan sistem, integrasi data keuangan, kemudahan penggunaan sistem, serta kemampuan sistem dalam mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan Kota Medan. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada kepala subbagian keuangan di setiap OPD.

Selanjutnya, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Hasil pengolahan data disajikan dalam tabel berikut, sehingga lebih mudah untuk memahami dan memahami kondisi masing-masing variabel penelitian.

Tabel 2. Analisis Deskripsi

Nama	Rata - Rata	Minimum	Maksimum	Standard Deviasi
LK1	4.100	2.000	5.000	0,518055556
LK2	4.200	2.000	5.000	0,453472222
LRA1	4.100	2.000	5.000	0,414583333
LRA2	4.067	2.000	5.000	0,536111111
LAK1	4.100	2.000	5.000	0,518055556
LAK2	4.133	2.000	5.000	0,465277778
CALK1	4.200	2.000	5.000	0,519444444
CALK2	4.267	2.000	5.000	0,536111111
AP1	4.233	2.000	5.000	0,528472222
AP2	4.333	2.000	5.000	0,517361111
AI1	4.133	2.000	5.000	0,498611111
AI2	4.100	2.000	5.000	0,486111111
AT1	4.067	3.000	5.000	0,436805556
AT2	4.267	3.000	5.000	0,436805556
AKDP1	4.200	3.000	5.000	0,416666667
AKDP2	4.267	2.000	5.000	0,472222222
AK1	4.167	2.000	5.000	0,569444444
AK2	4.233	2.000	5.000	0,557638889
KK1	4.333	2.000	5.000	0,517361111
KK2	4.200	1.000	5.000	0,63125
LKK1	4.200	2.000	5.000	0,578472222
LKK2	4.233	1.000	5.000	0,613194444
LO1	4.200	1.000	5.000	0,605555556
LO2	4.100	2.000	5.000	0,518055556
SIPD1	4.133	2.000	5.000	0,498611111
SIPD2	4.333	2.000	5.000	0,517361111
SIPD3	4.300	2.000	5.000	0,511805556
SIPD4	4.333	3.000	5.000	0,451388889
R1	4.167	1.000	5.000	0,597222222

Nama	Rata - Rata	Minimum	Maksimum	Standard Deviasi
R2	4.167	2.000	5.000	0,477083333
ADL1	4.267	2.000	5.000	0,472222222
ADL2	4.300	2.000	5.000	0,511805556
DDH	4.167	2.000	5.000	0,477083333
DDH2	4.300	3.000	5.000	0,444444444
DD1	4.500	3.000	5.000	0,390972222
DD2	4.267	2.000	5.000	0,504861111

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel penerapan SAP nilai rata-rata antara 4,067 hingga 4,333. Nilai ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa penerapan SAP pada OPD telah berjalan dengan baik. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa jawaban responden cukup homogen, sehingga persepsi terhadap penerapan SAP cenderung konsisten. Selanjutnya, pada variabel SIPD, nilai rata-rata berada pada kisaran 4,133 hingga 4,333. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai sudah efektif, terutama dalam mendukung integrasi data, ketepatan waktu, serta keakuratan informasi.

Namun, pada variabel kualitas LKPD nilai rata-rata berkisar antara 4,167 dan 4,500, dengan indikator DD1 mendapatkan nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat baik menilai laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal keandalan, relevansi, dan daya banding informasi.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Untuk mengetahui seberapa valid dan reliabel indikator yang digunakan untuk menunjukkan konstruk laten, dilakukan evaluasi model pengukuran, juga dikenal sebagai model luar. Metode MultiTrait-MultiMethod (MTMM) digunakan untuk memeriksa convergent validity, discriminant validity, dan reliability dengan menggunakan nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha. (Ghozali & Latan, 2015).

1. Indicator Reliability

Dalam model reflektif, indikator reliabilitas digunakan untuk menentukan sejauh mana indikator mampu menunjukkan konstruk laten yang diukur. Menurut Hair *et al.*

(2021), nilai outer loading yang direkomendasikan adalah $\geq 0,708$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan lebih dari 50% varians konstruk laten.

Tabel 3. Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X)	LK1	0,900
	LK2	0,822
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X)	LRA1	0,862
	LRA2	0,767
	LAK1	0,862
	LAK2	0,811
	CALK1	0,894
	CALK2	0,854
	AP1	0,778
	AP2	0,822
	AI1	0,746
	AI2	0,747
	AT1	0,757
	AT2	0,756
	AKDP1	0,757
	AKDP2	0,805
	AK1	0,773
	AK2	0,755
	KK1	0,739
	KK2	0,804
	LKK1	0,757
	LKK2	0,850
LO1	0,903	
LO2	0,895	
Kualitas Laporan Keuangan	R1	0,896
	R2	0,885

Pemerintah	ADL1	0,796
Daerah (Y)	ADL2	0,779
	DDH1	0,801
	DDH2	0,874
	DD1	0,806
	DD2	0,874
	Penerapan	SIPD1
Sistem Informasi	SIPD2	0,905
	Pemerintah	SIPD3
Daerah (Z)	SIPD4	0,883

Sumber: Data Penelitian

Hasil tes menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi kriteria validitas konvergen dengan AVE di atas 0,50.

2. Internal Consistency Reliability

Internal Consistency Reliability digunakan untuk menilai konsistensi antar indikator dalam satu konstruk. Pengujian dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, di mana Cronbach's Alpha sebagai batas bawah dan Composite Reliability sebagai batas atas dalam mengukur keandalan. Menurut Hair *et al.*, (2021) nilai reliabilitas yang dapat diterima adalah minimal 0,70, dengan rentang yang disarankan antara 0,80–0,90.

Tabel 4. Construct Validity and Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kualitas LKPD (Y)	0,977	0,980	0,979	0,712
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Z)	0,940	0,941	0,950	0,750
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) (X)	0,889	0,890	0,923	0,665

Sumber: Data Penelitian

Semua konstruk dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh hasil tabel 4, karena setiap variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70.

3. Convergent validity

Convergent validity dinilai melalui nilai Average Variance Extracted (AVE). Jika nilai $AVE \geq 0,50$, maka konstruk dinyatakan valid karena mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya, (Hair *et al.*, 2021). Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. Oleh karena itu keseluruhan indikator dan variabel dapat dinyatakan valid.

4. Discriminant validity

Discriminant validity dinilai menggunakan nilai Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT). Konstruk dinyatakan memenuhi kriteria jika nilai $HTMT < 0,90$ atau $< 0,85$ untuk konstruk yang berbeda, (Hair *et al.*, 2021).

Tabel 5. Discriminant Validity

Variabel	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) (X) <-> Kualitas LKPD (Y)	0,804
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) (X) <-> Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Z)	0,629
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Z) <-> Kualitas LKPD (Y)	0,839

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan tabel 5, seluruh nilai HTMT antar variabel berada di bawah batas yang disarankan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat diskriminasi yang baik, di mana indikator dalam satu variabel lebih mampu menjelaskan kostruknya dibandingkan dengan konstruk lainnya

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Untuk mengevaluasi hubungan antar variabel laten dalam penelitian. Secara khusus, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan nilai R-Square. Selain itu, koefisien jalur juga dikenal sebagai koefisien jalur digunakan untuk

1. R-Square (R^2)

Pengujian R-Square digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Hair *et al.* (2021), nilai R-Square sebesar 0,75 dikategorikan kuat, 0,50 sedang, dan 0,25 lemah.

Tabel 6. Nilai *R-Square*

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kualitas LKPD (Y)	0,789	0,766

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,789. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 78,9%, yang termasuk dalam kategori kuat. Sementara itu, sisanya sebesar 21,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

2. F-Square

Pengujian F-Square dilakukan untuk menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hair *et al.* (2021) mengklasifikasikan nilai f-square sebesar 0,02 sebagai pengaruh kecil, 0,15 sedang, dan 0,35 besar.

Tabel 7. Nilai *F-Square*

Variabel	Kualitas LKPD (Y)
Kualitas LKPD (Y)	
Penerapan SIPD (Z)	0,557
Penerapan SAP (X)	0,578
Penerapan SIPD (Z) x Penerapan SAP (X)	0,126

Sumber: Data Penelitian

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel penerapan SIPD (Z) terhadap kualitas LKPD (Y) memiliki nilai f persegi 0,557 dan termasuk dalam kategori pengaruh besar. Variabel penerapan SAP (X) terhadap kualitas LKPD (Y) juga memiliki nilai f persegi 0,578 dan juga termasuk dalam kategori pengaruh besar. Interaksi antara SIPD dan SAP terhadap kualitas LKPD memiliki nilai f persegi 0,126, dan termasuk dalam kategori pengaruh sedang.

3. Path Coefficient

Pengujian path coefficient dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel dalam model penelitian. Nilai koefisien jalur yang lebih besar dari nol (> 0) menunjukkan hubungan positif, sedangkan nilai yang lebih kecil dari nol (< 0) menunjukkan hubungan negatif.

Tabel 8. *Path Coefficient*

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standart Deviation	T statistics	P values	Hasil
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) (X) -> Kualitas LKPD (Y)	0,454	0,558	0,198	2,289	0,022	Valid
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Z) -> Kualitas LKPD (Y)	0,432	0,384	0,171	2,530	0,011	Valid
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Z) x Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) (X) -> Kualitas LKPD (Y)	-0,108	-0,107	0,143	0,756	0,449	Tidak Valid

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan tabel 8, variabel penerapan SAP dan penerapan SIPD memiliki nilai *path coefficient* positif terhadap kualitas LKPD, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerapan SAP dan SIPD cenderung diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Namun, variabel interaksi antara SAP dan SIPD menunjukkan arah hubungan negatif. Meskipun demikian, berdasarkan nilai t-statistic dan p-value, hanya pengaruh langsung SAP dan SIPD yang signifikan, sedangkan efek interaksi tidak signifikan.

Uji Moderasi

Uji moderasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel SIPD mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan SAP dan kualitas LKPD. Variabel moderasi dikatakan signifikan apabila memenuhi kriteria, yaitu nilai t-statistic $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$ (Ghozali & Latan,2023).

Dengan t-statistic sebesar 0,756 dan p-value sebesar 0,449, interaksi antara SIPD dan SAP menunjukkan nilai coefficient jalan sebesar -0,108. SIPD tidak berperan sebagai variabel moderasi karena nilai tersebut tidak memenuhi kriteria signifikansi. Dengan kata lain, pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD tidak diperkuat atau diperlemah oleh keberadaan SIPD.

Uji Hipotesis

Nilai rasio jalan, nilai t-statistic, dan nilai p digunakan untuk menguji hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau tidak.

Dengan demikian, hipotesis pertama diterima dan variabel interaksi antara SIPD dan SAP memiliki nilai *path coefficient* -0,103 dengan p-value 0,483 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 8. Hasil uji menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,443 dengan p-value 0,026 ($< 0,05$).

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai variabel moderasi. Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semakin banyak SAP digunakan, semakin baik LKPD. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan SAP dan kualitas LKPD. Artinya, meskipun SIPD berdampak positif secara langsung terhadap kualitas LKPD, SIPD belum mampu memperkuat atau memperlemah dampak SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, SIPD belum melakukan fungsi yang signifikan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan bahwa, meskipun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, kinerja sistem informasi masih bergantung pada hal-hal lain, seperti kesiapan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi yang paling efektif.

Beberapa keterbatasan penelitian ini harus dipertimbangkan. Pertama, penelitian ini hanya membahas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua, mungkin ada bias subjektivitas dalam jawaban responden karena data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner berdasarkan persepsi responden. Ketiga, penelitian ini tidak mencakup semua aspek lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi. Karena itu, variabel yang digunakan hanya berkaitan dengan penerapan SAP, SIPD, dan kualitas LKPD.

Secara teoretis, penelitian ini membantu memperkuat penelitian teori institusional, terutama dengan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan bentuk tekanan normatif dan regulatif yang mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme institusional tertentu, seperti penerapan sistem informasi, tidak secara otomatis memegang mekanisme institusional lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, R., Priambadha, M. A., Abimanyu, A., & Ardiansyah, R. (2024). Implementation Of Accrual – Based Government ccounting Standards (Sap) On The Qualityof Presentation Of Government. *Journal of SOcial and Economics Research*, 6(1), 174–94.
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Atharizka, N., Nurjanah, Y., & Andrianto, T. (2021). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(2), 107–118.
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(1), 90–102. <https://doi.org/10.22437/jmk.v12i01.17228>
- Dewi, M., Sumiati, N., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi. *Jurnal Profita, Universitas Dehasen Bengkulu*, 2(1), 1–8. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/4500>
- Dimagg, J., & Powell. (2016). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And Collective Rationality In Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <http://www.jstor.org/Stable/2095101>
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(5), 1–9.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan SmartPLS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2023). *Partial Least Squares (PLS): Metode, teori, dan pengembangan terbaru*.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Cham : Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Herzeqovina, B., & Erlina, S. E. (2019). Factors Affecting the Quality of Regional Financial Statements in RAO (Regional Apparatus Organization) of Deli Serdang Regency with the Governmental Internal Control System as a Moderating Variable. *International Journal of Research & Review*, 6(6), 409–417.
- Jati. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana: Jurnal*

Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 22(1), 1–14.
<https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145>

- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 181–197. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3738>
- Pinto, J. (2017). A multifocal framework for developing Intentionally Sustainable Organizations. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 28(2), 17–23. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.07.002>
- Pratiwi. (2024). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Di Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sekarsih, F. N., Mustopa, A., Dewi, M. M., Pringgondani, R., & Kukuh, K. (2024). Wisata virtual di geopark Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul sebagai media promosi pariwisata daerah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2600–2608.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yamin, N. Y., Lawaidjo, M. R., & Ridwan. (2025). Moderation of Human Resource Competencies in Quality of Financial Statements: Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, and Control Environment. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 1539–1551. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5968>